

Guru dan Pendidikan Agama di Sekolah

Oleh Muslih Usa

Ketua Penyunting JPI

Para ahli dimanapun juga, bersepakat bahwa pendidikan merupakan suatu modal yang sangat penting bagi suatu bangsa dalam menciptakan *Sumber Daya Manusia* (SDM) bagi kebutuhan pembangunan di segala bidang. Arah dan tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk mencapai suatu bentuk kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya dengan mengejar ketertinggalan di berbagai bidang sesuai tahapan-tahapan tertentu (*Sri Haningsih, 2003 : 69*).

Atas pemahaman yang demikian, Indonesia mengambil langkah-langkah pemerataan dalam bidang pendidikan sebagai upaya memperbaiki kualitas SDM-nya. Tahap-tahap awal dimulai dengan memperbaiki sistem pendidikan peninggalan penjajah dan melengkapi sarana dan prasarannya. Langkah berikutnya, dalam bentuk yang lebih sistematis menerapkan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984 dan pemberantasan buta huruf. Kebijakan ini sebagai langkah awal dari sasaran pemerataan di bidang pendidikan.

Peningkatan dari itu adalah penancangan dan pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 1994. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, maka sebelumnya perangkat pendidikan telah ditingkatkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sejak

tahun 1992 dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kebijakan-kebijakan yang lebih ditekankan pada asumsi pemerataan tersebut, ditempuh sebagai upaya memberikan batasan pendidikan minimal yang harus diperoleh setiap anak bangsa. Ukurannya memang tidak lepas dari kaitan dengan pemberantasan buta huruf, *melek huruf*, dan terciptanya suatu masyarakat belajar. Pengharapannya adalah terciptanya SDM yang mendukung pembangunan; bukan justru menjadi beban pembangunan.

Namun setelah hampir 20 tahun penerapan wajib belajar 6 tahun atau lebih 10 tahun pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kondisi SDM bangsa Indonesia belum banyak berubah jika dilihat dari aspek beban dan sasaran pembangunan. Ditengarai, kualitas output lembaga Pendidikan Islam, secara umum jauh lebih rendah. Pengangguran yang mencapai sekitar 37% dari angkatan kerja, di samping karena krisis ekonomi, politik, disebut juga sebagai bagian dari kegagalan pendidikan yang belum mampu melahirkan generasi terampil dan kreatif.

Kebanyakan para ahli juga menilai bahwa pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan (*Sri Haningsih, 2003 : 69*). "Konsep dan kebijakan melalui wajib belajar belum mencapai hasil yang memuaskan", ungkap *Prof. Dr. H.*

Nanat Fatah Natsir, (PR, 17/01/2003); dengan menunjukkan berbagai data yang mendukung pernyataannya.

Data BPS (*Badan Pusat Statistik*) menggambarkan bahwa jumlah anak yang putus sekolah masih sangat tinggi dibandingkan dengan yang bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Menurut hasil penelitian, tahun 1995-1999 saja pencapaian kelulusan baru hanya sekitar 56,96% (30,57% laki-laki dan 26,39% perempuan). Menurut *Nanat Fatah Natsir*, ini berarti hanya sepertiga peserta didik yang bisa meneruskan sekolah. Kenyataan tersebut menunjukkan beratnya daya dukung masyarakat untuk menopang pendidikan.

Dalam Sensus Ekonomi Nasional tahun 1997, ditemukan bahwa *Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)* baru sekitar 60%. Angka buta huruf masih sekitar 10% dari penduduk umur 10 tahun ke atas. Kemampuan membaca murid Sekolah Dasar (SD) di Indonesia terendah di kawasan ASEAN. Dengan mengutip data dari *The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)*, *Nanat Fatah Natsir* sebagaimana yang dikutip Haningsih (2003:69), menunjukkan bahwa hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar di Indonesia, masih berada pada urutan ke 26 dari 27 negara peserta yang diteliti.

Dalam bidang akademis, kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa SMP di Indonesia pada tahun 1999, berada pada urutan ke-32 dari 38 negara yang mengikuti. Sedangkan dalam bidang matematika, siswa Indonesia menempati urutan ke-34 dari 38 negara, atau lebih rendah

dari peringkat IPA. Dalam Dokumen Departemen Pendidikan Nasional yang mengutip hasil report dari *Human Development Index (HDI)*, mencatat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia hanya menduduki peringkat 102 dari 106 negara, atau lebih rendah dari Vietnam. Demikian pula hasil penelitian *Political Economic Risk Consultation (PERC)* yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 12 dari 12 negara yang diteliti.

Sebagaimana juga banyak disinggung oleh para pakar pendidikan, *Nanat Fatah Natsir* (PR, 17/01/2003) menyebutkan bagian dari penyebabnya adalah lemahnya kualitas sektor utama pendukung pendidikan seperti tenaga guru, kurikulum, manajemen pendidikan serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai.

Menurut *Pembantu Rektor I IAIN Sunan Gunung Djati* Bandung ini, alasan tersebut menunjukkan perlunya strategi baru dalam menciptakan masyarakat yang *melek* huruf. Sedangkan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana, rendahnya kualitas guru, kurikulum dan manajemen pendidikan, salah satu cara mengatasinya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan.

Sejalan dengan otonomi daerah, maka di beberapa daerah di Indonesia memang telah menempuh langkah perbaikan-perbaikan secara lebih bersahaja. Upayanya antara lain dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan secara lebih serius. Di Kabupaten Bantul misalnya, peningkatan kualitas guru ditempuh

dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menempuh studi lanjut (S2) dan pada tahun 2004 tercatat sudah lebih 100 orang dengan biaya Pemerintah Kabupaten. Tetapi kebijakan demikian belum merata di seluruh daerah di Indonesia.

Namun penyelesaian terhadap masalah pendidikan secara menyeluruh (keseluruhan permasalahan dalam dunia pendidikan kita), tentu tidak terlepas dari persoalan dana. Dalam APBN 2002/2003, dana (APBN) untuk pendidikan hanya mencapai 8%. Menurut prosentasi APBN dan jumlah penduduk atau GNP (*Gross National Product*), anggaran sektor pendidikan di Indonesia lebih rendah di banding Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, atau Filipina.

Dari kenyataan ini, *Nanang Nuryanta*, (2002:87), menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia masih memandang pendidikan sebagai *second priority*. Bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, politik, sosial dan hukum. Padahal, berbagai kalangan di Indonesia sepakat, anggaran merupakan aspek penting dalam memperbaiki dan memajukan sektor pendidikan.

Oleh karena itu, *Prof. Dr. H. Suyanto*, (2000:6) mengatakan bahwa buruknya kondisi pendidikan yang terjadi tersebut karena di negara kesatuan ini para pemimpinnya tidak memiliki *political will* yang kuat untuk memperbaiki pendidikan nasional. "Sektor pendidikan hanya cukup diucapkan dan diakui penting, tetapi ucapan dan pengakuan itu tidak diimplementasikan dalam skala prioritas penganggaran", tambah Rektor UNY ini.

Menurut *Nanang Nuryanta*, sebagaimana dikemukakan dalam JPI Vol. VII Juni 2002, bahwa semua ini lebih dikarenakan bahwa pemerintah Indonesia belum memiliki visi yang jelas tentang pendidikan nasional. Ini mengakibatkan konsep pendidikan yang *applicable* dan *survivable* dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era informasi ini menjadi kabur.

Bahkan, lanjut *Nuryanta*, pendidikan di Indonesia secara umum belum memiliki profil dan model yang ideal dalam mengembangkan potensi individu. Ini termasuk atas munculnya konsep pendidikan terpadu (*integrated education*) yang masih mengundang pro kontra di antara pemerhati pendidikan itu sendiri. Wacana perbedaan ini menyangkut "keterpaduan" pada sisi substansi atau pada strukturnya.

Mengingat permasalahan dalam pendidikan nasional Indonesia, apalagi Pendidikan Islam, terutama aspek kualitas (terendah di kawasannya), maka pemerintah dan segenap komponen bangsa perlu kembali memberikan perhatian serius terhadap sektor ini. Tingkat seriusnya harus berada di atas atau minimal sejajar dengan sektor pembangunan politik, pembangunan ekonomi dan lain-lainnya. Pengharapan ini kita tujukan langsung kepada pemimpin bangsa saat ini, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI pertama hasil pilihan langsung rakyat melalui Pemilu 2004 yang dinilai cukup demokratis

Wujud nyata tahap pertama harus ditampakkan dalam keberanian mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, yang diukur dengan prosentase jumlah pendudukan dan GNP, sehingga dapat

melengkapi dan memenuhi syarat dalam peningkatan kualitas serta tanpa membedakan segenap jenjang dan jenis lembaga pendidikan yang ada di negeri ini. Maksudnya, tidak ada dikotomi lembaga pendidikan umum yang ada di bawah Diknas dengan lembaga pendidikan Islam di bawah Depag., karena semua satu dan sama-sama berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian yang tidak kalah penting lainnya dari sasaran ini adalah agar anak-anak yang putus sekolah karena biaya, dapat terakses melalui prosedur ini dan bukan hanya membantu mereka yang masih aktif bersekolah. Ini penting mendapat perhatian karena jumlahnya yang terlalu besar.***